

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Tanggung Jawab.....	I
Kata Pengantar.....	II
Daftar Isi.....	III
Ringkasan Laporan Keuangan.....	IV
Neraca.....	V
Laporan Realisasi Anggaran.....	VI
Laporan Operasional.....	VII
Laporan Perubahan Ekuitas.....	VIII
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	3
Bab. II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	
2.1. Ekonomi Makro	4
2.2. Kebijakan Keuangan.....	4
Bab. III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	4
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	5
Secara umum	5
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	7
	8
Bab IV Kebijakan Akuntansi	
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	8
4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	8
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	8
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD	13
	15
Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD	15
5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca	15
5.1.1. Aset	16
5.1.2. Kewajiban	22
5.1.3. Ekuitas Dana	23
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
5.2.1 Pendapatan	23
5.2.2 Belanja	23
5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	29
5.3.1. Pendapatan	29
5.3.2. Beban	29
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	33

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	
6.1. Visi Misi	34
6.2. Tugas Pokok dan Fungsi	34
6.3. Struktur Organisasi	34
6.4. Rekening SKPD	35
6.5. Pengungkapan Lain-lain	35
Bab 7 Penutup	37

DAFTAR LAMPIRAN

- **Lampiran 1**
 - ❖ SPJ Fungsional

- **Lampiran 2**
 - ❖ Register SPP-SPM-SP2D

- **Lampiran 3**
 - ❖ Jurnal Umum Balik
 - ❖ Jurnal Umum Koreksi
 - ❖ Jurnal Umum Penyesuaian

- **Lampiran 4**
 - ❖ Berita Acara Rekon Internal Data Barang Milik Daerah
 - ❖ Laporan Pengurus Barang
 - ❖ Berita Acara Opname Fisik Persediaan oleh Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur serta lampirannya

- **Lampiran 5**
 - ❖ Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran oleh Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur
 - ❖ Rekening Koran Tahun 2020
 - ❖ STS yang disetor sebelum 31 Desember 2020 beserta bukti penyetorannya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat Rahmat dan AnugrahNya telah disusun Laporan Keuangan BPKD Kab Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan aturan turunannya, Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Mengamanatkan bahwa satuan kerja perangkat Daerah berkewajiban Menyusun, Menyajikan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Kepada Kepala Daerah melalui PPKD.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan, Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Malili, 20 Maret 2021

Kepala BPKD

Dr RAMADHAN PIRADE.SE,M.M
NIP 19700814 200212 1 006

I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 58 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|--------|--|
| Bab I | Pendahuluan |
| | 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan |
| | 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan |
| Bab II | Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan |

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara umum
 - 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD
- Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
 - 5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
 - 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1 Pendapatan
 - 5.2.2 Belanja
 - 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban
 - 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
- Bab 7 Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Struktur Pemerintahan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain :

- ✓ Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.
- ✓ Jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
- ✓ Besarnya pengaruh sektor pertambangan terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, yang menyebabkan sektor lain menjadi terabaikan dan kurang mendapat perhatian Pemerintah Daerah.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89), yang mencakup:

- a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen
- c. Pembukuan
- d. Pertanggungjawaban (SPJ)
- e. Pengawasan .
- f. Pelaporan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan secara umum pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

Pagu Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur tahun 2020 adalah **Rp. 30.538.459.448,04** terbagi menjadi 54 kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp 28.612.503.045,00** atau **93.69%** dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur, dapat diuraikan pada tabel berikut :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji dan Tunjangan	3.061.065.470,06	2.550.113.966	83.30
2	Tambahan Penghasilan PNS	7.358.693.595,98	6.887.575.461	93.59
3	Iuran Jaminan Kesehatan	12.000.000.000	12.000.000.000	100
4	Iuran Jaminan Kecelakaan kerja Dan Jaminan Kematian	2.292.452.111	1.710.376.069	74.60
5	Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan	50.000.000	44.450.000	88.09
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254.023.151	212.698.784	83.73
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	34.716.000	34.716.000	100
9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	83.500.000	82.555.000	98.86
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	197.530.000	197.509.700	99.98
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.699.000	60.699.000	100
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	15.000.000	15.000.000	100

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

13	Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.610.000	12.760.000	87.33
14	Penyediaan Makan Minum	67.500.000	67.500.000	100
15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	457.240.000	457.238.250	99.99
16	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Tekhnis	276.000,000	240,000,000	86.95
17	Monitoring Dan Evaluasi	8.637.000	8.594.000	99.50
18	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	16.616.000	16.608.200	99.95
21	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.077.521	192.842.548	96.86
23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	66.500.000	66.268.150	99.65
24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	119.310.000	113.142.925	94.83
26	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	18.480.000	18.480.000	100
27	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.102.000	25.222.000	89.75
28	PPenyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	10.000.000	9.977.000	99.77
29	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10.000.000	9.876.000	98.76
30	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan penganggaran SKPD	26.502.000	26.380.250	99.54
32	Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	290.502.500	275.439.827	94.81
33	Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran APBD	263.651.000	262.496.700	99.56
34	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	250.605.000	245.712.000	98.04
35	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	246.853.000	246.294.900	99.77
36	Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Surat Penyediaan Dana	20.100.000	20.100.000	100
37	P Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA	19.255.000	19.144.000	99.42
38	Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	70.081.500	69.215.769	98.76
39	P Peningkatan Sistim Pengelolaan Keuangan daerah	324.300.000	251.590.000	77.57
40	Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	142.080.200	130.600.200	91.92
41	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	22.055.000	20.920.000	94.85
42	Penatausahaan Keuangan Daerah	238.610.800	222.374.096	93.19
43	Penyusunan Neraca dan Pembukuan Keuangan daerah	16.700.000	16.625.000	99.55
44	Pendataan Sumber – sumber Pendapatan Daerah	65.173.349	64.161.300	98.44

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

45	Penetapan Wajib Pajak Daerah	263.208.900	246.411.400	93.61
46	Rekonsialisasi Laporan Pendapatan daerah	65.182.000	62.924.500	96.53
47	Manajemen Pengelolaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan	610.873.750	567.534.700	92.90
48	Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah, Dana Transfer dan Lain – Lain Pendapatan daerah	269.698.100	242.343.100	89.85
49	Penyusunan Regulasi Pendapatan daerah	142.810.000	142.333.700	99.66
50	Optimalisasi Penyelesaian Pendapatan daerah	52.170.000	51.450.000	98.61
51	Penghapusan Barang Milik Daerah	179.430.000	146.719.000	81.76
52	Penyusunan Standar Harga Satuan	16.831.600	16.515.000	98.11
53	Penatausahaan Barang Milik daerah	160.637.250	150.057.750	93.41
54	Pemamfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah	81.546.650	80.954.800	99.27
Jumlah		30.538.459.448,04	28.612.503.045.00	93.69

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan yang mempengaruhi kinerja SKPD adalah :

- ✚ Keterbatasan SDM pada bidang keuangan serta kurangnya personil yang ditempatkan dalam pengelolaan keuangan yang mengakibatkan pengelolaan keuangan masih mengalami tata kelola keuangan yang tidak tertib sehingga berimplikasi kepada output yang tidak maksimal.
- ✚ Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
- ✚ Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- ✚ Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola Bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan - satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dikeluarkan dari BUD.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan Daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari :

- 1) **Kas di Kas Daerah** merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada di Rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi disebut setara kas apabila investasi tersebut mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- 2) **Kas di Bendahara Penerimaan** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.
- 3) **Kas di Bendahara Pengeluaran** merupakan kas yang masih berada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah.

Kas dinyatakan dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs BI pada tanggal neraca.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

4.3.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan / atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

4.3.4 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

4.3.5 Aset Tetap

- a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

1. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

2. Peralatan dan Mesin

- ✚ Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- ✚ Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- ✚ Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi

- ✚ Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- ✚ Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
- ✚ Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

4.3.6 Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

4.3.7 Aset lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklasifikasi aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang BPKD Kabupaten Luwu Timur, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.8 Konstruksi dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Pembayaran untuk kontrak konstruksi dilakukan melalui termin. Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset ini dapat dilakukan melalui jurnal korolari.

Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

4.3.9. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

4.3.10 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Pos ekuitas dana terdiri dari:

- 1) **Ekuitas Dana Lancar** merupakan selisih antara asset lancar dengan hutang lancar. Nilai ekuitas dana lancar menunjukkan surplus atau defisit keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam jangka pendek.
Penilaian :
 - a. Perkiraan SiLPA Tahun Berjalan dan akumulasi SiLPA disajikan sebesar nilai nominal, sedangkan penyajian dalam neraca dan laporan keuangan dilakukan sesuai kebutuhan daerah;
 - b. Perkiraan cadangan piutang disajikan sebesar saldo piutang jangka pendek yang tercantum di neraca debet;
 - c. Perkiraan cadangan disajikan sebesar nilai persediaan yang dihitung berdasar harga beli terakhir atau harga standar atau harga estimasi.
Untuk pengungkapannya disesuaikan dengan kebutuhan
- 2) **Ekuitas Dana Diinvestasikan** merupakan selisih antara investasi permanen, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk dana yang dicadangkan) dengan hutang jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Pencantuman dilaporan keuangan disajikan sebesar nilai yang diinvestasikan.
- 3) **Ekuitas Dana Dicapang** merupakan dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan, untuk tujuan pembiayaan ke depan, biasanya disiapkan guna pelaksanaan proyek yang memerlukan dana relatif besar. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar nilai yang dicadangkan. Sedangkan penyajiannya diungkapkan secara cukup sesuai peruntukan, batasan dan cara penyisihannya;
- 4) **Ekuitas Dana Donasi** merupakan kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi dan merupakan penerimaan hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima dari pihak ketiga. Ekuitas Dana Donasi diakui pada akhir periode sebesar nilai nominal penerimaan hibah, sumbangan maupun swadaya masyarakat.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan SKPD lainnya;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;
- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan atas pos-pos neraca menyesuaikan dengan akun-akun yang tercantum dalam neraca. Komposisi Neraca per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019	% Naik/ (Turun)
Aset	30.513.559.336,13	32.234.747.549,43	0,94
Kewajiban	383.314.010,70	330.013.887,67	1,16
Ekuitas	30.063.235.221,43	31.904.651.661,76	0,94

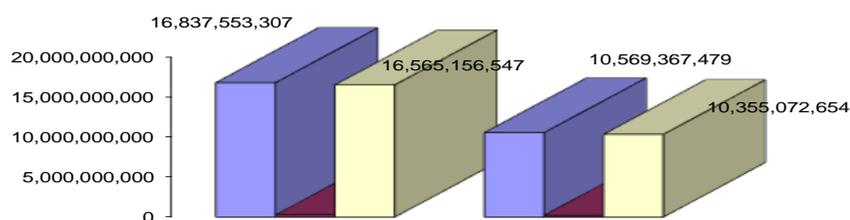
Jumlah Aset per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 30.513.559.336,13** terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp. 20.077.515.869,93** dan Aset Tetap sebesar **Rp. 8.180.029.586,00** dan Aset Lainnya sebesar **Rp. 2.256.013.880,20**

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 383.314.010,70** merupakan kewajiban jangka pendek sebesar **Rp. 383.314.010,70**.

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 30.063.235.221,43**

Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti dibawah ini :

Grafik 1. Komposisi Neraca



5.1.1. Aset

5.1.1.1. Aset Lancar

5.1.1.1.1. Kas

5.1.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp **0,00** dan Rp **0,00** yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Jumlah tersebut terdiri dari :

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

Tabel 1
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2020(Rp)	TA 2019 (Rp)
Bank Sulselbar Cabang Malili (93.002.0034.6)	0,00	0,00
Uang tunai	0,00	0,00
Jumlah Kas	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname Kas Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur sesuai Nomor : 094/013/I/ITKAB tanggal 15 Januari 2021 (terlampir).

Saldo kas UP/GU/TU Kas sebesar Rp **132.138.200,00-** sampai dengan 31 Desember 2020 telah disetor ke Kas Umum Daerah (terlampir).

5.1.1.1.1.2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.**0,00**.

5.1.1.1.1.3. Persediaan

Saldo ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **108.573.300,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2
Rincian Persediaan

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
Alat Tulis Kantor		
Benda Berharga	19.533.800,00	21.220.875,00
Cetak Blanko	89.039.500,00	49.694.000,00
Jumlah Kas	108.573.300,00	70.914.875,00

Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik Tim Inspektorat Kab. Luwu Timur sesuai SPT Nomor : 094/013/I/ITKAB/ 2021 tanggal 15 Januari 2021 (terlampir).

5.1.1.2. Aset Tetap

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah, Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2020 sebesar **Rp.** dan per 31

Desember 2019 sebesar **Rp. 8.589.574.005,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Rincian Aset Tetap

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
(a)	Tanah	774.668.122,00	800.537.657,00
(b)	Peralatan dan Mesin	4.529.258.161,42	4.446.340.613,42
(c)	Gedung dan Bangunan	6.053.213.287,00	6.293.993.287,00
(d)	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.400.595.326,00	2.400.595.326,00
(e)	Aset Tetap lainnya	5.200.000,00	5.560.000,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	13.875.000,00	22.775.000,00
(g)	Akumulasi Penyusutan	(5.596.780.310,42)	(5.044.583.637,42)
Jumlah Aset Tetap		8.189.398.336,00	8.925.218.246,00

Selama Tahun 2020 mutasi aset tetap sebagai berikut :

Penambahan :

- + Belanja modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2020 sebesar Rp **180.842.548,00-**
- + Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan sebesar **Rp 64.850.000,00.**
- + Reklas dari Aset Lain-lain (Ubah Kondisi) sebesar **Rp 221.000.000,00.**
- + Reklas dari Belanja Modal Aset tetap Lainnya (2020) **Rp 12.000.000,00**
- + Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar (2020) **Rp 12.00.000,00**

Pengurangan :

- + Penyerahan Ke Dishut Propinsi (P3D) sebesar **Rp 25.869.535,00**
- + Mutasi Peralatan dan Mesin ke Kecamatan Burau sebesar **Rp 37.950.000,00**
- + Penghapusan Peralatan dan Mesin Kendaraan Dinas sebesar **Rp 64.190.000,00**
- + Penyerahan Peralatan dan Mesin ke Dishut Propinsi (P3D) sebesar **Rp 1.650.000,00**
- + Reklas Gedung dan Bangunan ke Aset Peralatan dan mesin sebesar **Rp 64.850.000,00**
- + Penyerahan Gedung dan Bangunan ke dishut Propinsi (P3D) **Rp 175.930.000,00**
- + Reklas Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar **Rp 12.000.000,00**
- + Penyerahan Aset Tetap lainnya ke Dishut Propinsi (P3D) sebesar **Rp 360.000,00**

Adapun Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Saldo Aset Tetap per 1 Januari 2020	

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

	Rp . 13.969.801.883,42
Penambahan :	
Belanja Modal	Rp 192.842.548
Belanja Barang/Jasa	Rp -
Hibah/Hadiah	Rp -
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi	Rp 297.850.000
Utang Retensi 2020	Rp
Jumlah Penambahan	Rp 490.692.548
Pengurangan :	
Penghapusan	Rp -
Penyerahan	Rp 203.809.535
Reklasifikasi	Rp 178.990.000
Hibah	Rp -
Mutasi Keluar	Rp
Utang retensi 2020	Rp
Jumlah Pengurangan	Rp 382.799.535
Saldo Aset Tetap 31 Desember 2020	Rp 14.077.694.896,42

(a) Tanah

Saldo Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 774.668.122 ,00**, dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal	
Tanah Kantor	Rp. 800.537.657,00
Jumlah	Rp. 800.537.657,00
Penambahan	
Tanah Kantor	Rp. -,00
Jumlah	Rp. -,00
Penghapusan/pengurangan	
Tanah	Rp. 25.869.535,00
Jumlah	Rp. 25.869.535,00
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp. 0,00
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp. (0,00)
Saldo Akhir	Rp. 774.668.122,00

Penambahan aset tanah tahun 2020 sebesar **Rp.0,00** Belanja

Belanja Modal Tanah 2018 **Rp .0,00**

➤ Pengurangan aset tanah tahun 2020 sebesar **Rp.25.869.535,00**.

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

(b) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 1.121.929.849,00** dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal	
Alat-alat angkutan darat bermotor	Rp. 940.552.500,00
Alat Bengkel dan Alat ukur	Rp. 12.870.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 2.429.266.893,42
Alat Studio dan alat Komunikasi	Rp. 84.820.000,00
Alat Laboratorium	Rp. 9.500.000,00
Alat – alat Persenjataan/Keamanan	Rp. 17.930.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Rp. 142.803.000,00
Pengadaan Meubelair	Rp. 156.334.000,00
Pengadaan alat Bantu keamanan	Rp. 41.879.000,00
Pengadaan Alat pendingin	Rp. 80.709.800,00
Pengadaan alat dapur	Rp. 10.948.000,00
Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor	Rp. 17.496.925,00
Pengadaan alat Rumah tangga Lainnya	Rp. 7.500.000,00
Pengadaan Personal Komputer	Rp. 225.683.060,00
Pengadaan Peralatan Personal Komputer	Rp. 34.997.000,00
Pengadaan Peralatan Jaringan	Rp. 9.598.515,00
Pengadaan Kursi Pejabat	Rp. 8.000.000,00
Pengadaan Lemari dan arsip Pejabat	Rp. 9.500.000,00
Gorden	Rp. 99.942.000,00
Sound Sistem	Rp. 29.524.000,00
Tendon air	Rp. 4.000.000,00
Peralatan Studio Visual	Rp. 72.485.920,00
Jumlah	Rp. 4.446.340.613,42
Penambahan	
Pengadaan Peralatan Mini Komputer	Rp. 39.730.500,00
Pengadaan Personal Komputer	Rp. 94.397.999,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp. 19.548.450,00
Pengadaan Peralatan Personal computer	Rp. 27.165.599,00
Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan	Rp. 64.850.000,00
Reklas dari Aset Lain-lain	Rp. 221.000.000,00
Jumlah	Rp. 478.692.548,00
Penghapusan/pengurangan	
Reklas ke Kecamatan Burau	Rp. 37.950.000,00
Penghapusan Kendaraan Dinas	Rp. 64.190.000,00
Penyerahan Ke Dishut Propinsi (P3D)	Rp. 1.650.000,00
Jumlah	103.790.000,00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	Rp. (3.699.313.312,42)
<i>Total Akumulasi Penyusutan</i>	Rp. (3.699.313.312,42)
Saldo Akhir	Rp. 1.121.929.849,00

➤ Penambahan aset peralatan dan mesin tahun 2020 sebesar **Rp. 478.692.548,00**

➤ Pengurangan aset peralatan dan mesin tahun 2020 sebesar **Rp. 103.790.000,00**

Akumulasi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sampai dengan Tahun 2020 sebesar **Rp. 3.699.313.312,42**

(c) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 4.800.397.913,00** dengan perincian sebagai berikut :

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

- Penambahan aset Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar **Rp. 6.293.993.287,00**
 - Pengurangan aset Gedung dan bangunan tahun 2020 sebesar **Rp. 240.780.000,00**
- Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sebesar **Rp 1.252815.374,00**

(d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 1.464.427.452,00** dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal	
Jembatan	Rp. 952.100.000,00
Instalasi Listrik	Rp. 104.949.000,00
Jaringan Distribusi	Rp. 47.242.800,00
Instalasi Air	Rp. 10.000.000,00
Mutasi dari dishut	Rp. 483.279.000,00
Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Rp. 585.545.526,00
Jumlah	Rp. 2.400.595.326,00
Penambahan	
Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 0,00
Penghapusan/pengurangan	
Jaln.irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 0,00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	Rp. (936.167.874,00)
<i>Total Akumulasi Penyusutan</i>	Rp. (936.167.874,00)
Saldo Akhir	Rp. 1.464.427.452,00

- Penambahan aset Jaringan,Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar **Rp. 0,00**
- Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar **Rp.0,00.**
- Akumulasi Penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan Tahun 2020 sebesar **Rp. 936.167.874,00** (*terlampir*).

Aset Tetap lainnya

Saldo Aset tetap lainnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 5.200.000,00**, dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal	
Buku dan kepustakaan	Rp. 4.000.000,00
Buku Umum Mutasi dari dishut	Rp. 1.200.000,00
Buku Ilmu Sosial mutasi dari KPHL	Rp. 360.000,00
Jumlah	Rp. 5.560.000,00
Penambahan	
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercocok Kebudayaan Alat Olah Raga	Rp. 12.000.000,00
Jumlah	Rp. 12.000.000,00
Penghapusan/pengurangan	
Reklas Ke Peralatan Dan Mesin	Rp. 12.000.000,00
Penyerahan ke Dishut Propinsi (P3D)	Rp. 360.000,00
Jumlah	Rp. 12.360.000,00
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp. 0,00
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp. (0,00)
Saldo Akhir	Rp. 5.200.000,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

- Penambahan Aset tetap lainnya tahun 2020 sebesar **Rp. 12.000.000,00**
- Pengurangan Aset tetap lainnya tahun 2020 sebesar **Rp. 12.360.000,00**

(e) Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 0,00**, dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal	
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 8.900.000,00
Konstruksi dalam Pekerjaan	Rp. 13.875.000,00
Jumlah	Rp. 22.775.000,00
Penambahan	
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 0,00
Penghapusan/pengurangan	
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. ,00)
Jumlah	Rp. ,00)
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp. 0,00
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp. (0,00)
Saldo Akhir	Rp. 22.775.000,00

- Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2020 sebesar **Rp.,00.**
- Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) sebesar **Rp.,00,**

(f) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur periode 31 Desember 2020 sebesar **Rp 2.998.351.342,-**. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nama Aset		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2018	Nilai Buku 31 Desember 2018
1. Aset Tetap				
1	Tanah	774.668.122,00	0,00	774.668.122,00
2	Peralatan dan Mesin	4.821.243.161,42	3.699.313.312,42	1.121.929.849,00
3	Gedung Bangunan	6.053.213.287,00	1.252.815.374,00	4.800.397.913,00
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	2.400.595.326,00	936.167.874,00	1.464.427.452,00
5	Aset Tetap lainnya	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	22.775.000,00	0,00	22.775.000,00
Jumlah		14.077.694.896,42	5.888.296.560,42	8.189.398.336,00

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

5.1.2. Kewajiban

5.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.1.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

5.1.2.1.2. Utang Bunga

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

5.1.2.1.3. Utang Pajak

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah **Rp 0,00** dan **Rp 0,00**.

5.1.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah **Rp 0,00** dan **0,00**.

5.1.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp 30.063.235.221,43** dan **Rp 31.904.651.661,76** Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.2.1. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp 222.074.294.622,78**.

5.2.2. BELANJA

Menjelaskan jumlah rupiah dan persentase dari jumlah yang dianggarkan dalam DPA Tahun Anggaran 2020. Realisasi Belanja pada Badan Pengelolaan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp 28.612.503.045,00** atau sebesar **93.69 %** dari total anggaran sebesar **Rp 30.539.459.448,04**

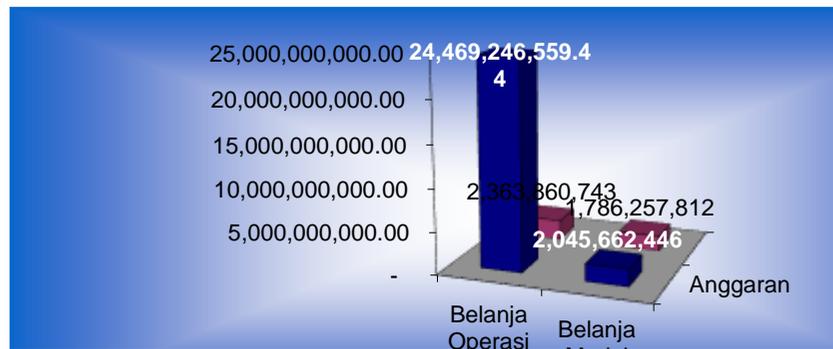
Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	(%)
5.1	Belanja Operasi	30.339.381.927,04	28.419.660.497,00	93,67
5.3	Belanja Modal	199.077.521,00	192.842.548,00	96,87
	Jumlah Total	30.538.459.448,04	28.612.503.045,00	93,16

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat dalam grafik berikut :



Grafik 2. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar **Rp 3.035.255.047** atau **11.86 %** dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 7
Perbandingan realisasi Belanja TA 2020 dan 2019

Kode Jenis Blj.	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/ (Turun)	
		TA 2020	TA 2019	Rp	%
5.1	Belanja Pegawai	23.192.515.496,00	17.031.901.074,00	6.160.614.422	34,18
5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.227.145.001,00	7.577.032.326,00	(2.349.887.325)	(36,17)
5.3	Belanja Modal	192.842.548,00	968.314.598,00	(775.472.050)	(80,08)

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

	Jumlah Total	28.612.503.045.00	25.577.247.998.00	3.035.255.047	11.86
--	--------------	-------------------	-------------------	---------------	-------

A. Belanja Pegawai

Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 adalah **Rp. 24.762.211.177,04** sedangkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 23.192.515.496,00** atau **93,66 %** dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 8
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2020

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Gaji Pokok/uang representasi	1.958.362.755,06	1.957.747.100,00	99.96
Tunjangan Keluarga	355.790.549,00	189.157.300,00	53.16
Tunjangan Jabatan	367.278.000,00	249.185.000,00	67.84
Tunjangan Fungsional Umum	170.536.375,00	45.830.000,00	26.87
Tunjangan Beras	204.042.193,00	106.312.560,00	52.10
Tunjangan PPh/Khusus	5.001.238,00	1.853.848,00	37.06
Pembulatan Gaji	54.360,00	28.158,00	51.79
Iuran Jaminan Kesehatan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian	2.292.452.111,00	1.710.376.069,00	74.60
Tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.228.426.000,00	1.837.512.557,00	82.45
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya.	5.130.267.595,98	5.050.062.904,00	98.43
BBiaya Pemungutan Pajak daerah Bumi dan bangunan	50.000.000,00	44.450.000,00	88.9
Jumlah	24.762.211.177,04	23.192.515.496.00	93.66

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

Realisasi belanja pegawai TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp 23.192.515.496,00-** dan **Rp. 17.031.901.074,00-**. Perbedaan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan :

Adapun Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai untuk Tahun 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Gaji Pokok	1.957.747.100	1.906.703.800	51.043.300	2.67
Tunjangan Keluarga	189.157.300	190.461.844	(1.304.544)	(0.68)
Tunjangan Jabatan	249.185.000	237.910.000	11.275.000	4.73
Tunjangan Umum	45.830.000	48.785.000	(2.955.000)	(6.05)
Tunjangan Beras	106.312.560	105.443.520	869.040	0.82
Tunjangan PPh/Khusus	1.853.848	2.657.729	(803.881)	(30.24)
Pembulatan Gaji	28.158	28.807	(649)	(2.2.5)
Iuran Jaminan Kesehatan	12.000.000.000	5.488.495.863	6.511.504.137	118.6
Iuran Jaminan Kecelakaan kerja Dan jaminan Kematian	1.710.376.069	1.756.863.874	(46.487.805)	(2.64)
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.837.512.557	2.053.072.670	(215.560.113)	(10.49)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya	5.050.062.904	4.840.593.367	209.469.537	4.32
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	44.450.000	400.884.600	(356.434.600)	(88.91)
Realisasi Belanja	23.192.515.496.00	17.031.901.074.00	6.160.614.422	36.17

B. Belanja Barang dan Jasa

Pagu anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 **Rp 5.577.170.750,00** sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp 5.227.145.001,00** atau **93.72 %** dari alokasi Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan.

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 10
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2020

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Bahan Habis Pakai	896.622.599	891.561.650	99.43
Belanja Jasa Kantor	1.346.273.151	1.198.368.784	89.01
Belanja Bahan Material	77.250.000	50.000.000	64.72
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	119.310.000	113.142.925	94.83
Belanja Cetak dan Penggandaan	799.569.300	784.106.100	98.06
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	77.550.000	29.545.000	38.09
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.500.000	4.790.000	20.38
Belanja Makanan dan minuman	253.570.000	215.690.000	85.06
Belanja Perjalanan Dinas	1.630.725.700	1.599.017.392	98.05
Belanja Pemeliharaan	150.000.000	148.823.150	99.21
Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000	44.600.000	99.11
Belanja Honorarium PNS	157.800.000	147.500.000	93.47
Jumlah	5.577.170.750,00	5.227.145.001,00	93.72

Realisasi belanja Barang dan Jasa TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 5.227.145.001** dan **Rp. 7.576.950.326** Adapun Rincian perbandingan realisasi belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 dan 2019, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 dan TA 2019

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Bahan Habis Pakai	891.561.650	893.329.800	(1.768.150)	(0.19)
Belanja Jasa Kantor	1.198.368.784	937.037.281	261.331.503	27.88
Belanja Bahan/Material	50.000.000		50.000.000	0.00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	113.142.925	127.193.100	(14.050.175)	(11.04)
Belanja Cetak dan Penggandaan	784.106.100	728.435.500	55.670.600	7.64

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

Belanja Sewa Rumah/gedung	29.545.000	16.625.000	12.920.000	0.77
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.790.000	3.990.000	800.000	20.05
Belanja Makanan dan minuman	215.690.000	326.540.000	(110.850.000)	(33.94)
Belanja Perjalanan Dinas	1.599.017.329	3.710.977.145	(2.111.959.816)	(56.91)
Belanja Pemeliharaan	148.823.150	131.385.000	17.438.150	13.27
Belanja Jasa Konsultansi	44.600.000	381.537.500	(336.937.500)	(88.31)
Belanja Kursus, Pelatihan,		175.600.000	(175.600.000)	(100)
Belanja Honorarium PNS	147.500.000	144.300.000	3.200.000	2.21
Realisasi Belanja	5.227.145.001	7.576.950.326	(2.349.805.325)	(31.01)

C. Belanja Modal

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 adalah **Rp. 199.077.521,00** sedangkan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 192.842.548,00** atau **96.87 %** dari alokasi Belanja Modal yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Modal Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 12
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA. 2020

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan alat Rumah Tangga Lainnya	20.000.000	19.548.450	97.74
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer	95.000.000	94.397.999	99.36
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Mini Komputer	44.077.521	39.730.500	90.13
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer	28.000.000	27.165.599	97.01
Belanja Modal Aset tetap Lainnya Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah raga	12.000.000	12.000.000	100
Jumlah	199.077.521	192.842.548	96.87

Realisasi belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp. 192.842.548,00** dan **Rp. 968.314.598,00**.

Rincian perbandingan realisasi belanja Modal Tahun 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019

Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang		407.310.500	(407.310.500)	(100)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat penyimpanan Perlengkapan Kantor		17.496.925	(17.496.925)	(100)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Meubelair		27.220.000	(27.220.000)	(100)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pendingin		25.880.800	(25.880.800)	(100)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Dapur		1.698.000	(1.698.000)	(100)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya	19.548.450	38.110.400	(18.561.950)	(48.70)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal	94.397.999	155.513.580	(61.115.581)	(39.29)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Personal Komputer	27.165.599	152.518.580	(125.352.981)	(82.18)
Belanja Modal Peralatan Mini Komputer	39.730.500		39.730.500	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Oengadaan Barang Bercocok Kebudayaan Alat Olah raga	12.000.000		12.000.000	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		223.275.893	(223.275.893)	(100)
Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jaringan Distribusi		72.516.500	(72.516.500)	(100)
Jumlah	192.842.548	968.314.598	(775.472.050)	(80.08)

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp 222.074.294.622,78.**

5.3.2. BEBAN

Realisasi belanja di Tahun Anggaran 2020 terdapat realisasi belanja yang tidak menjadi beban di Tahun Anggaran 2020. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	Penyesuaian	LO
1	Beban Pegawai	23.192.515.496	-	23.192.515.496
2	Beban Persediaan	-	-	-
3	Beban Barang dan Jasa	5.227.145.001	-	5.190.769.116
4	Beban Pemeliharaan	-	-	-

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

5	Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
6	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
7	Beban Penyusutan	-	-	871.549.495
8	Beban Penghapusan Aset	-	-	-
9	Beban Penyisihan Piutang	-	-	43.814.019,43
10	Beban Lain-Lain	-	-	-
	Jumlah	28.419.660.497		29.298.648.126,63

5.3.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp 23.192.515.496** dan **Rp 17.031.901.074** Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal:

Tabel 14
Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2019

Uraian Jenis Beban	2020	2019	Naik (turun)%
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.957.747.100	1.906.703.800	1.02
Beban Tunjangan Keluarga	189.157.300	190.461.844	0.99
Beban Tunjangan Jabatan	249.185.000	237.910.000	1.04
Beban Tunjangan Fungsional Umum	45.830.000	48.785.000	0.93
Beban Tunjangan Beras	106.312.560	105.443.520	1.00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.853.848	2.657.729	0.69
/Beban Pembulatan Gaji	28.158	28.807	0.97
Beban Iuran Jaminan Kesehatan	12.000.000.000	5.488.495.863	2.18
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian	1.710.376.069	1.756.863.874	0.97
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.837.512.557	2.053.072.670	0.89
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya	5.050.062.904	4.840.593.367	1.04
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	44.450.000	400.884.600	0.11
Jumlah	23.192.515.496	17.031.901.074	1.36

5.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp 5.190.769.116,00** dan **Rp 7.604.799.697,17**. Adapun penjabaran definisi untuk masing-masing beban, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Beban Persediaan** merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- **Beban Jasa** adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

- **Beban Pemeliharaan** merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
- **Beban Perjalanan Dinas** merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 15
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

Uraian Jenis Beban	2020	2019	Naik (turun)%
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	865.753.650,00	840.965.800,00	1.02
Beban Persediaan Alat listrik dan Elektronik	15.000.000,00	27.620.000,00	0.54
Beban Persediaan Perangkat Materai dan Benda Pos Lainnya	74.700.000,00	15.300.000,00	4.88
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.716.000,00	11.448.500,00	0,93
Beban Persediaan Bahan Cetak		28.414.125,00	0,00
Beban Persediaan Bahan Perlombaan/Plakat	50.000.000,00		0,00
Beban Jasa Telepon	77.171,00	408.840,00	0.18
Beban Jasa Air	4.520.150,00	17.039.650,00	2.79
Beban Jasa Listrik	145.038.463,00	143.476.141,00	0.26
Beban Jasa Surat Kabar/majalah	11.110.000,00	10.920.000,00	0.97
Beban Kawat/Faksimili/Internet	63.063.000,00	38.436.750,00	1.64
Beban Jasa Publikasi	11.650.000,00		0.00
Beban Jasa Upah Kerja	651.160.000,00	611.555.900,00	1.06
Beban Jasa tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	311.750.000,00	115.200.000,00	2.70
Beban Jasa Service	4.747.400,00	10.420.000,00	0.45
Beban Penggantian Suku Cadang	64.837.400,00	80.077.500,00	0.80
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	37.393.675,00	28.689.400,00	1.30
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.538.990,00	5.436.946,17	1.38
Beban Cetak	370.765.075,00	448.897.500,00	0.82
Beban Penggandaan	369.172.600,00	264.638.000,00	1.52
Beban Jilid	6.510.000,00	5.600.000,00	1.39
Beban Dokumentasi		9.300.000,00	0.00
Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	29.545.000,00	16.625.000,00	1.77
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.790.000,00	3.990.000,00	1.20
Beban Makanan dan Minuman Rapat	166.190.000,00	272.090.000,00	0.61
Beban Makanan dan Minuman Tamu	49.500.000,00	54.450.000,00	0.90
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	352.263.200,00	403.530.700,00	0.87
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.246.754.192,00	3.307.446.445,00	0.37
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.555.000,00	96.448.000,00	0.85
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66.268.150,00	34.937.000,00	1.89

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

Beban Jasa Konsultansi Manajemen	44.600.000,00	381.537.500,00	0.11
Beban Bimbingan Teknis		175.600.000,00	0.00
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	147.500.000,00	144.300.000,00	1.02
Jumlah	5.190.769.116,00	7.604.799.697,17	0.68

5.3.2.3. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp 0** dan **Rp 0**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

5.3.2.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar **Rp 871.549.495,00** dan **Rp 745.058.345,42**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 16
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2019

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	2020	2019	Naik (turun) %
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	100.172.216,00	99.566.206,00	1.01
Beban Penyusutan Alat Kantor	24.722.668,00	34.235.366,42	0.72
Beban Penyusutan Alat Ukur	214.500,00	2.574.000,00	0.08
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	108.529.706,00	106.968.338,00	1.01
Beban Penyusutan Komputer	84.068.731,00	92.440.938,00	0.90
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	37.351.400,00	45.957.342,00	0.81
Beban Penyusutan Alat Studio	3.206.615,00	8.584.834,00	0.37
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	64.850.000,00	10.233.368,00	6.33
Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	1.100.000,00	1.100.000,00	1.00
Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktik Sekolah	250.000,00		0.00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir	19.454.746,00		0.00
Beban Penyusutan Senjata Sinar	1.195.332,00	1.195.332,00	1.00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	165.940.185,00	192.061.603,00	0.86
Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan	16.048.250,00		0.00

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

Beban penyusutan Jalan	21.747.900,00	21.747.900,00	1.00
Beban penyusutan Jembatan	40.004.800,00	40.004.800,00	1.00
Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	1.488.200,00	1.488.200,00	1.00
Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana alam	94.439.452,00	94.439.452,00	1.00
Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	400.000,00	400.000,00	1.00
Beban Penyusutan Jaringan Listrik	3.804.794,00	2.294.034,00	1.65
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya.	82.560.000,00		0.00
Jumlah	871.549.495,00	745.058.345,42	1.16

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perubahan ekuitas nilai aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Uraian	2020	2019
EKUITAS AWAL	31.904.651.661,76	22.539.797.892,64
SURPLUS/DEFISIT-LO	186.350.839.776,12	180.823.618.366,27
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas lainnya	5.336.555.465,33	1.873.489.494,43
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	(193.461.883.577,78)	(173.332.254.091,58)
EKUITAS AKHIR	30.130.163.325,43	31.904.651.661,76

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

6.1. VISI MISI

6.1.1. VISI

Terwujudnya Pengelolaan keuangan Dan Pendapatan daerah yang dinamis,Transparan dan Akuntabel.

6.1.2. MISI

- ❖ Peningkatan pendapatan daerah yang dinamis dan berkesinambungan.
- ❖ Pengelolaan Keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.
- ❖ Optimalisasi pengelolaan aset daerah.

6.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

6.2.1. TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

6.2.2. FUNGSI

- ❖ Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset daerah..
- ❖ Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- ❖ Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- ❖ Pengelolaan Administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- ❖ Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang berlaku

6.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi Tata Kerja, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pendapatan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 3 Sub Bidang :
 - Subbidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Asli Daerah
 - Subbidang Penetapan Pendapatan Asli Daerah
 - Subbidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
3. Bidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain –Lain Pendapatan Daerah terdiri dari 3 Sub Bidang :
 - Subbidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - Subbidang Dana Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Daerah

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

- Subbidang Keberatan, Banding dan Pengkajian Pendapatan Daerah
- 4. Kepala Bidang Anggaran, terdiri dari 3 Subbidang :
 - Subbidang Perencanaan dan Penyusunan anggaran
 - Subbidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan
 - Subbidang Analisis Anggaran
- 5. Kepala Bidang Akuntansi, terdiri dari 3 Subbidang :
 - Subbidang Verifikasi
 - Seksi Pembukuan Dan Neraca Daerah
 - Seksi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
- 6. Kepala Bidang Aset Daerah, terdiri dari 3 Subbidang :
 - Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
 - Subbidang Penghapusan Barang Milik Daerah

6.4. REKENING SKPD

Rekening yang digunakan dalam kegiatan operasional adalah Bank Sulsel Cabang Malili dengan Nomor Rekening : **093.002.0018** an. Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur.

6.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 15/I/2020 tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020, tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, Pejabat yang diberi Kewenangan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur adalah :

Kuasa Pengguna Anggaran an : **Dr. Ramadhan Pirade. SE, MM**

Bendahara Pengeluaran : **Fatmawaty Alwy**

Pengurus Barang : **Fatmawati .Amd**

- Sedangkan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Surat Keputusan dikeluarkan oleh Kepala Badan.
- Surat Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 5/2020, tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, terdiri dari :
 - ❖ **Rannu Iusnup Siampa, SE** selaku PPTK bidang pendapatan;
 - ❖ **Ince Hamiruddin, SE** selaku PPTK bidang pendataan

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

- ❖ **Maharani Jalil,S.TP** selaku PPTK bidang pendataan
- ❖ **Sulkia Akbar,SE** selaku PPTK bidang Penagihan;
- ❖ **Chaeruddin Arfah.M,S.IP** selaku PPTK Bidang Penagihan
- ❖ **Agus Abdullah,SE.M.Si** selaku PPTK bidang penagihan
- ❖ **Ricoh,SE** selaku PPTK Bidang Anggaran
- ❖ **Hasbiyanto B,SE** selaku PPTK bidang Anggaran;
- ❖ **Muh. Ikhsan S.SE** selaku PPTK Bidang Anggaran
- ❖ **Herawaty Muslimin,SE** selaku PPTK bidang Akuntansi;
- ❖ **Indrawaty Nurdin,SE** selaku PPTK Bidang Akuntansi
- ❖ **Syamsusl Risal,SE** selaku PPTK bidang Aset;
- ❖ **Zaki Juhdan, S.Pd** selaku PPTK bidang Aset
- ❖ **Masrul Sadli,S.Sos** selaku PPTK bidang Aset
- ❖ **Rachmawati,SE** selaku PPTK Sekertariat
- ❖ **Herawati Rijal, SE** selaku PPTK Sekretariat
- ❖ **Yusni Marsan, SE** selaku PPTK Sekretariat
- ❖ **Sriyani Amri A,Md**, selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
- ❖ Surat Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 4 Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu atas nama **Agus Abdullah,SE.**

BAB VII

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2020 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berakhir 31 Desember 2020, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami sebagai salah satu SKPD

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020
yang melaksanakan Anggaran.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malili, 20 Maret 2021
Kepala BPKD,

Dr RAMADHAN PIRADE, SE.MM
Pangkat : Pembina Tingkat I
Nip : 19700814 200212 1 006

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan pada TA 2020 adalah Sebesar **Rp 222.074.294.622,78** atau Mencapai **117,10** Persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp 189.640.866.729,13**

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp **28.612.503.045,00** atau mencapai **93.69** persen dari alokasi anggaran sebesar Rp **30.538.459.448,04**

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020 .

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar **Rp 30.513.559.336,13** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp 20.077.515.869,93** Aset Tetap sebesar **Rp 8.180.029.586,00** dan Aset Lainnya sebesar **Rp 2.256.013.880,20**, Kewajiban sebesar **Rp 383.314.010,70** dan Ekuitas sebesar **Rp 30.063.235.221,43**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp 215.582.559.798,75** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp 29.231.720.022,63** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp 186.350.839.776,12**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar **Rp 31.904.651.661,76** ditambah Surplus/deficit LO sebesar **Rp 186.350.839.776,12** ditambah Koreksi Ekuitas sebesar **Rp 5.336.555.465,33** ditambah Kewajiban dikonsolidasikan sebesar **Rp (193.461.883.577,78)** sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai **Rp 30.130.163.325,43**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**BAB VII
PENUTUP**

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2020 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi **Badan**

Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2020

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berakhir 31 Desember 2020, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.